



Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan Volume 3 Nomor 3 Tahun 2021 Halm 963 - 971

## EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN

Research & Learning in Education

<https://edukatif.org/index.php/edukatif/index>



### Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas di Sekolah Menengah Pertama

Aulia Diana Devi<sup>1✉</sup>, Subiyantoro<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia<sup>1,2</sup>

E-mail : [19204090026@student.uin-suka.ac.id](mailto:19204090026@student.uin-suka.ac.id)<sup>1</sup>, [subiyantorodr@gmail.com](mailto:subiyantorodr@gmail.com)<sup>2</sup>

#### Abstrak

Desentralisasi pendidikan merupakan suatu bentuk reformasi yang perlu dijalankan dengan baik, salah satunya dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMPN 3 Negeri Besar. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data menggunakan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui media online. Analisis datanya yaitu dengan pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan MBS sudah diterapkan SMPN 3 Negeri Besar, Negeri Besar, Way Kanan dengan melakukan tiga gerakan inspiratif yaitu (1) Program manajemen sekolah terbuka dengan melakukan pendekatan dengan komite dan orang tua siswa, (2) Program jumpa kopi sebagai tingkatkan minat baca, dan (3) program SIMAK atau Sinergi Interaksi Memantau Aktif Pembelajaran di Kelas. Dengan adanya program MBS, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

**Kata Kunci:** MBS, Kualitas, Pendidikan.

#### Abstract

*Decentralization of education is a form of reform that needs to be carried out properly, one of which is by implementing School-Based Management (SBM). The purpose of this research is to find out the implementation of School-Based Management (SBM) in SMPN 3 Negeri Besar. The type of research used is descriptive qualitative. Data collection uses primary data sources obtained through interviews and secondary data sources obtained through online media. Data analysis is by data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing. The results showed that the implementation of SBM has been implemented SMPN 3 Negeri Besar, Negeri Besar, Way Kanan by doing three inspiring movements, namely (1) Open school management program by approaching with committees and parents of students, (2) Coffee meeting program as an increase in reading interest, and (3) SIMAK program or Synergy interaction monitoring active learning in the classroom. With the SBM program, it is expected to realize educational goals effectively and efficiently.*

**Keywords:** MBS, Quality, Education.

Copyright (c) 2021 Aulia Diana Devi, Subiyantoro

✉ Corresponding author

Email : [19204090026@student.uin-suka.ac.id](mailto:19204090026@student.uin-suka.ac.id)

DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i3.481>

ISSN 2656-8063 (Media Cetak)

ISSN 2656-8071 (Media Online)

## PENDAHULUAN

Desentralisasi atau otonomi pendidikan merupakan salah satu bentuk reformasi yang perlu dilaksanakan dengan baik. Reformasi sekolah adalah konsep bergeser ke peningkatan mutu dalam konteks manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah (MBS) merupakan cara yang ampuh untuk mewujudkan manajemen sekolah yang efektif dan efisien melalui lima bidang. Kelima bidang tersebut adalah manajemen kurikulum dan rencana pengajaran, pendidik, siswa, keuangan, sarana dan prasarana pendidikan (Ikhsan dan Anisykurlillah 2010, 1.). Sebagai satuan pendidikan yang mengemban tanggung jawab dan kewajiban dalam kegiatan pembelajaran, sekolah tidak hanya mengemban tugas untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap, tetapi juga harus menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik dan mental siswa, serta memberikan pelayanan yang aman bagi anggota, bahkan semua sekolah. Selain itu, kepemimpinan kepala sekolah juga menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan MBS. Kinerja kepemimpinan kepala sekolah merupakan segala upaya dan prestasi kepala sekolah dalam menerapkan MBS di sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif (Fitrah 2017, 31–32).

Madrasah pun belum memiliki kurikulum standar, serta manajemen dan strukturnya berbeda di setiap intansinya. Keadaan itu menyebabkan sulitnya kontrol dari pemerintah. Tetapi, hal tersebut menjadikan madrasah sebagai lembaga yang unik. Husni Rahim mengungkapkan hal-hal unik yang merupakan karakteristik madrasah pada saat itu. Pertama, madrasah dimiliki oleh masyarakat. Kedua, madrasah mempraktikkan manajemen berbasis sekolah. Ketiga, madrasah selaku lembaga untuk mendalami ajaran Islami (*tafaqquh fid dien*). Dan yang terakhir, madrasah selaku lembaga mobilisasi serta kaderisasi muslim. Karena itu, pantas saja madrasah belum dikatakan sebagai cabang dari Sistem Pendidikan Nasional. Namun, perihal tersebut tidak menjadikan madrasah terbelakang, tetapi sudah berjalan sedikit lebih maju. Perihal ini dapat dikatakan bahwa madrasah sudah menerapkan manajemen berbasis sekolah dengan menyesuaikan kondisi serta lingkungan daerah sekitar madrasah (Haranti dan Hudaidah 2021, hlm. 675.).

Manajemen berbasis sekolah (*school based management*) pada dasarnya memberikan kebebasan kepada sekolah untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan manajemen sekolah agar dapat secara efektif mencapai tujuan pendidikan. Setelah kebijakan pemerintah diundangkan melalui UU No. 1, gagasan penerapan MBS di semua pendidikan formal menjadi lebih jelas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, terdiri dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Tentang Otonomi Daerah) dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Februari 2000, mengenai Pembagian Kekuasaan antara Pemerintah Pusat dan Otonomi Daerah (Muhammad dan Rahman 2017, 610–11). Terbentuknya UU dan PP tersebut mengingatkan kepada kita bahwasanya terjadi pergeseran kewenangan pada pengelolaan pendidikan dalam peningkatan kualitas pendidikan di suatu lembaga pendidikan.

MBS adalah “model manajemen sekolah yang secara langsung mengelola sekolahnya sendiri dengan memberikan kewenangan yang lebih besar di tingkat sekolah”. Dari sudut pandang tersebut, dapat disimpulkan bahwa MBS adalah kewenangan yang diberikan kepada sekolah oleh pemerintah pusat untuk secara mandiri (otonom) mengatur atau mengatur segala sesuatu yang dibutuhkan sekolah, termasuk dalam pengambilan keputusan atau kebijakan sekolah. Melalui penerapan MBS, sekolah akan menarik lebih banyak pelanggan sekolah ketika merumuskan dan merumuskan kebijakan, artinya perumusan kebijakan internal akan melibatkan guru, pendidik, dan siswa. Secara eksternal, pelibatan komite sekolah dan orang tua siswa merupakan hal yang perlu dilakukan dalam menentukan kebijakan sekolah. Dengan cara ini, kebijakan akan dapat dirumuskan dan dipertanggung jawabkan (Mistrianingsih, Imron, dan Nurabadi 2015, 367).

Pelaksanaan MBS di sekolah memerlukan uraian serta komitmen dari segala pihak ialah makna penyelenggaraan pembelajaran hingga pada pihak-pihak yang terpaut. Otonomi dalam pengelolaan pembelajaran membagikan kesempatan kepada sekolah buat meningkatkan seluruh kemampuan masyarakat sekolah guna tingkatkan kinerja, serta tingkatkan uraian warga terhadap pembelajaran. Pelaksanaan MBS

tidak hanya bawa pergantian pada sistem manajemen sekolah, namun mempengaruhi pada kebijakan serta orientasi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembelajaran. Dengan adanya program MBS, diharapkan terdapat kerjasama antara pihak-pihak terkait partner sekolah guna penyelenggaraan serta pengelolaan pembelajaran. Dalam program MBS mengisyaratkan perlunya transparansi pengelolaan sekolah yang diawali dari proses perencanaan, penerapan hingga pada penilaian serta tindak lanjut. Artinya, seluruh masyarakat sekolah bersama dengan *stakeholder* wajib ikut serta dalam proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang di atas maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas di Sekolah Menengah Pertama.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif (Prastowo A 2012, 23). Lokasi penelitian adalah SMPN 3 Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan dan penelitian ini dilaksanakan pada bulan akhir Februari 2021. Subjek penelitian adalah Kepala Sekolah, guru, peserta didik dan staff TU serta sumber-sumber lainnya yang berkaitan. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, studi literatur, serta media internet. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui media *online*. Analisis data yang dilakukan yaitu dengan menggunakan beberapa langkah diantaranya dengan pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

### **Konsep Manajemen Berbasis Sekolah**

MBS berasal dari tiga kata, ialah manajemen, berbasis, serta sekolah. Manajemen merupakan proses memakai sumber energi secara efisien buat menggapai target. Berbasis mempunyai kata dasar basis yang berarti dasar ataupun asas. Sekolah ialah lembaga buat belajar serta mengajar dan tempat menerima serta membagikan pelajaran. Secara universal, manajemen berbasis sekolah (MBS) juga merupakan model manajemen yang membagikan otonomi lebih besar kepada sekolah, membagikan fleksibilitas ataupun keluwesan-keluwesannya kepada sekolah, serta mendesak partisipasi secara langsung masyarakat sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) serta warga sekolah (orang tua siswa, tokoh warga, ilmuwan, pengusaha, dsb) guna tingkatkan kualitas sekolah bersumber pada kebijakan pembelajaran nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sudarmawan Danim 2012, 22).

Dengan otonomi yang lebih besar, hingga sekolah mempunyai kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sekolahnya, sehingga sekolah lebih mandiri. Dengan kemandiriannya, sekolah lebih berdaya dalam meningkatkan program-program yang pasti serta lebih cocok dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimilikinya. Dengan fleksibilitas ataupun keluwesan-keluwesannya, sekolah hendak lebih pandai dalam mengelola serta menggunakan sumber energi sekolah secara maksimal. Demikian pula, dengan partisipasi/pelibatan masyarakat sekolah serta warga secara langsung dalam penyelenggaraan sekolah, hingga rasa mempunyai mereka terhadap sekolah bisa ditingkatkan. Peningkatan rasa mempunyai ini hendak menimbulkan peningkatan pada rasa tanggungjawab, serta peningkatan rasa tanggungjawab hendak meningkatkan pengabdian masyarakat sekolah serta warga terhadap sekolah. Inilah esensi partisipasi masyarakat sekolah serta warga dalam pembelajaran. Baik kenaikan otonomi sekolah, fleksibilitas pengelolaan sumber energi sekolah ataupun partisipasi masyarakat sekolah serta warga dalam penyelenggaraan sekolah tersebut kesemuanya diperuntukan buat tingkatkan kualitas sekolah bersumber pada kebijakan pembelajaran nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah itu Ibtisam mengemukakan bahwasanya MBS secara konseptual ditafsirkan selaku sesuatu pergantian resmi struktur penyelenggaraan, selaku wujud desentralisasi yang mengenali sekolah itu sendiri selaku unit utama kenaikan, dan bertumpu pada redistribusi kewenangan pembuatan keputusan selaku fasilitas berarti yang dengannya kenaikan bisa didorong serta ditopang (Duhou Abu Ibtisam 2012. 16). MBS secara konseptual merupakan langkah alternatif dalam mengatur sistem pelaksanaan pendidikan yang desentralisasi, yang mana sekolah menjadi penempatan elemen pertama dalam meningkatkan kualitas suatu pendidikan.

Bagi Aedi konsep ini membagikan redistribusi kewenangan para pembuat kebijakan selaku faktor sangat mendasar pada peningkatan kualitas hasil pembelajaran. Di pihak lain, MBS ialah metode untuk peningkatan motivasi kepala sekolah supaya lebih bertanggung jawab terhadap kualitas partisipan didik. Dengan demikian, telah selayaknya kepala sekolah meningkatkan program-program kependidikan secara merata dalam melayani seluruh kebutuhan partisipan didik di sekolah. Segala masyarakat sekolah seyogyanya menyongsong perihal ini dengan merumuskan program sekolah yang lebih prioritas serta operasional karena merekalah yang sangat mengenali hendak kebutuhan partisipan didiknya serta yang terbaik untuk partisipan didiknya. Inilah filosofis MBS sangat mendasar (Nur Aedi 2010, 15).

MBS ialah rancangan untuk manajemen sekolah yang bertujuan untuk peningkatan kualitas pendidikan di masa desentralisasi pendidikan. Hal ini juga disampaikan oleh Irianto, bahwasanya penerapan Manajemen Berbasis Sekolah membantu stakeholders dalam berpartisipasi aktif untuk penentuan arah sekolah (Bahtiar Yoyon Irianto 2011, 159). MBS ialah model tata kelola yang memberikan otonomi (kekuasaan dan tanggung jawab) yang lebih besar pada lembaga pendidikan, memberikan keleluasaan pada lembaga pendidikan, dan mendorong anggota sekolah (pendidik, peserta didik, pemimpin lembaga pendidikan serta dosen) dan masyarakat (orang tuasiswa, tokoh masyarakat, ulama serta *entrepreneur*) pada peningkatan kualitas sekolah sesuai dengan kebijakan pendidikan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rohiat 2008. 47). Penerapan MBS merupakan sebuah proses formal yang didalamnya terlibat pimpinan sekolah, pendidik, orang tua, siswa & warga yang berada dilingkungan sekolah pada proses pengambilan keputusan (Rosyada Dede 2012. 267).

Umaedi mengatakan mengenai konsep MBS ialah konsep yang menunjukkan kerjasama yang baik dan saling berhubungan antara sekolah, warga & pemerintah dengan tugasnya masing-masing dalam menyelenggarakan lembaga pendidikan. Orientasi manajemen dalam MBS bisa ditelusuri berdasarkan atas 6 indikator. Diantaranya sebagai berikut (Zakaria dan Ibrahim 2018, 1–18): (a) lingkungan sekolah yang aman dan tertib, (b) sekolah mempunyai visi dan misi, (c) sekolah mempunyai pemimpin yang kuat, (d) adanya harapan tinggi dari personel sekolah untuk berprestasi, (e) adanya pengembangan staf sekolah yang terus-menerus sesuai tuntutan IPTEK, (f) adanya pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai aspek akademik dan administratif dan pemanfaatan hasilnya untuk penyempurnaan atau perbaikan mutu, (g) adanya komunikasi dan dukungan intensif dari orangtua murid atau masyarakat. Adapun kata mutu sendiri dalam MBS memiliki makna mutu proses dan mutu hasil.

### **Prinsip dan Tujuan MBS**

Adapun prinsip-prinsip yang harus diperhatikan pada pelaksanaan manajemen peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MBS) diantaranya yaitu (Nur Aedi 2010. 11): (a) pendidikan yang efektif dengan mengikutsertakan seluruh *stakeholder* pada pelaksanaan pendidikan peserta didik; (b) sekolah ialah lembaga yang utama untuk pendidikan yang efektif; (c) segala keputusan sekolah dirancang oleh pihak-pihak yang memang memahami tentang lembaga pendidikan beserta semua elemennya; (d) tenaga pendidik wajib ikut serta dalam pembentukan sebuah rancangan tata olah pendidikan dan kurikulum; (e) sekolah mandiri membentuk keputusan penempatan biaya; (f) dengan mengikutsertakan para *stakeholder* akan memicu perubahan dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang.

Prinsip-prinsip MBS menurut Husni ialah penyerahan tanggungjawab pada sekolah untuk pengelolaan semua sumber daya yang ada dengan berpedoman pada prinsip kemandirian, kemitraan, keterbukaan,

keadilan, efisiensi serta keakuntabilisan dengan meletakkan tugas sekolah pada pembuatan keputusan secara bersama demi tercapainya sebuah tujuan pendidikan (Karna Husni 2015. 2-3).

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, MBS bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pemberian wewenang dalam menata sekolah, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan sekolah, meningkatkan tanggung jawab sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan, meningkatkan kompetensi dalam bersaing antar sekolah.

Aedi (Nur Aedi 2010. 5) mengemukakan, manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MBS) bertujuan untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan atau otonomi kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif. Lebih rincinya, Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah bertujuan untuk: (a) meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia, (b) meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama, (c) meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya, (d) meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai.

Dalam pengertian bisnis, MBS merupakan keseluruhan proses pemanfaatan berbagai komponen pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan, yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pihak-pihak yang terkait atau berkepentingan dengan mutu pendidikan. Dalam pengertian tersebut komponen-komponen tersebut antara lain meliputi kurikulum dan pembelajaran, siswa, kepegawaian, infrastruktur dan keuangan. Yaitu, manajemen diri, desain diri, organisasi mandiri, pengarahannya sendiri, kontrol atau evaluasi oleh semua pihak terkait (Ibrahim Bafadal 2013. 84).

Melihat tujuan MBS di atas, dapat disimpulkan bahwa MBS bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sekolah dengan memberikan kewenangan, keluwesan dan sumber daya untuk meningkatkan mutu sekolah mandiri. Oleh karena itu: (a) Sekolah sebagai lembaga pendidikan lebih memahaminya. dengan institusi lain, kekurangan, peluang dan ancaman yang dimilikinya memungkinkannya untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk memajukan lembaganya; (b) Sekolah lebih memahami kebutuhan lembaganya, terutama dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa. Investasi pendidikan untuk pembangunan dan pemberdayaan; (c) sekolah dapat bertanggungjawab tentang mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah, orang tua peserta didik, dan masyarakat pada umumnya, sehingga ia akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan; (d) sekolah dapat melakukan persaingan sehat dengan sekolah-sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovasi dengan didukung orang tua peserta didik, masyarakat dan pemerintah daerah setempat.

### **Strategi, Kerangka Kerja MBS**

Penerapan MBS mempunyai tiga tujuan, yaitu: (1) meningkatkan kapasitas kepala sekolah, guru, dan komite sekolah dalam MBS untuk meningkatkan mutu sekolah. (2) di sekolah dan masyarakat sekitar, mengembangkan kapasitas kepala sekolah, guru, dan komite sekolah untuk melaksanakan pembelajaran yang aktif dan menarik. (3) dari anggota komite sekolah, masyarakat harus lebih aktif terlibat dalam masalah pendidikan umum untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan (Umiarso dan Imam Gojali 2010. 80). Keberhasilan penerapan MBS sangat bergantung pada apakah kepala sekolah dapat berpartisipasi dalam semua komponen pengelolaan sekolah melalui otorisasi, terutama untuk memperkuat kewenangan seluruh masyarakat, dan berperan aktif dalam pengelolaan sekolah.

Secara garis besar, Fattah (Siahaan Amiruddin dkk 2006. 32) membagi implementasi MBS menjadi tiga tahap: (1) tahap sosialisasi, adalah tahapan untuk merencanakan suatu cara yaitu memberikan perubahan terutama daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh media informasi, baik cetak maupun elektronik yang akan mencapai suatu tujuan yaitu masyarakat akan dapat menerima perubahan tersebut dan beradaptasi dengan baik

dengan lingkungan yang baru; (2) tahap piloting, adalah tahap ini merupakan tahap uji coba agar penerapan konsep manajemen berbasis sekolah tidak mengandung resiko; (3) tahap diseminasi, adalah merupakan tahapan memasyarakatkan model MBS yang telah diuji cobakan keberbagai sekolah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Mutu proses mengacu pada input dan penciptaan suasana yang kondusif. Mutu hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada kurun waktu tertentu. Kerangka kerja MBS sebagaimana dikemukakan Umaedi (Slamet, PH 2016. 34) meliputi: (1) sumber daya, artinya sekolah harus mempunyai fleksibilitas dalam mengatur semua sumber daya sesuai dengan kebutuhan setempat. Selain pembiayaan operasional atau administrasi pengelolaan keuangan harus ditujukan untuk memperkuat sekolah dalam mengalokasikan dana sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan untuk proses peningkatan mutu, pemisahan antara biaya yang bersifat akademis dari proses pengadaanya dan pengurangan kebutuhan birokrasi pusat; (2) pertanggungjawaban (*accountability*) artinya setiap sekolah harus memberikan laporan pertanggung-jawaban dan mengkomunikasikannya kepada orangtua atau masyarakat dan pemerintah dan mengkaji ulang secara komprehensif terhadap pelaksanaan program prioritas sekolah dalam peningkatan mutu; (3) kurikulum, artinya sekolah bertanggungjawab mengembangkan kurikulum yang telah ditentukan secara nasional namun harus mempertimbangkan tiga aspek seperti: (a) pengembangan kurikulum harus memenuhi kebutuhan siswa, (b) bagaimana mengembangkan keterampilan pengelolaan untuk menyajikan kurikulum tersebut kepada siswa secara efektif dan efisien dengan memperhatikan sumber daya yang ada; (c) pengembangan berbagai pendekatan yang mampu mengatur perubahan sebagai fenomena alamiah di sekolah; (d) personil Sekolah artinya sekolah bertanggungjawab dan terlibat dalam proses rekrutmen dan pembinaan structural staf sekolah.

Strategi implementasi MBS dilakukan melalui tahapan sebagai berikut (Hadi Miarso Yusuf 2014728.): (a) penyusunan batas data dan profil sekolah presentatif, akurat, valid dan secara sistematis menyangkut berbagai aspek akademis, administratif dan keuangan; (b) melakukan evaluasi diri untuk menganalisa kekuatan dan kelemahan mengenai sumber daya sekolah, personil sekolah, kinerja dalam mengembangkan dan mencapai target kurikulum dan hasil-hasil yang dicapai siswa berkaitan dengan aspek-aspek intelektual dan keterampilan maupun aspek lainnya; (c) mengidentifikasi kebutuhan sekolah dan merumuskan visi, misi dan tujuan dalam rangka menyajikan pendidikan yang berkualitas bagi siswanya sesuai dengan konsep pembangunan pendidikan nasional yang akan dicapai; (d) sekolah bersama masyarakat merencanakan dan menyusun program jangka panjang atau jangka pendek (tahunan termasuk anggarannya).

### **Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di SMPN 3 Negeri Besar**

Manajemen sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah Indonesia harus mengikuti prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS). Pengurus sekolah dapat membuktikan MBS ini melalui kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan sekolah. Selain itu, UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan juga mengatur tentang MBS. Penerapan MBS telah dilaksanakan oleh SMPN 3 Negeri Besar di Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan. Tri Haryono selaku kepala sekolah serta merupakan dari komunitas sekolah melaksanakan MBS dengan melakukan tiga tindakan inspiratif. Ia telah melakukan perubahan dalam manajemen sekolah, pembelajaran, budaya baca dan partisipasi masyarakat. Di sekolah ini, praktik MBS telah diapresiasi oleh beberapa pihak.

Manajemen Berbasis Sekolah di SMPN 3 Negeri Besar: Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMPN 3 Negeri Besar sebenarnya sudah lama diterapkan, karena banyak guru yang tidak menyadari akan arti dari manajemen berbasis sekolah membuat kepala sekolah, guru dan warga sekolah pada umumnya secara tidak sadar menerapkan MBS. Inti dari MBS sendiri adalah kemandirian dalam pengelolaan sekolah, otonomi sekolah untuk membuat MBS mudah diterapkan. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan sekolah ada dua hal yang menjadi rujukan yaitu peraturan dinas pendidikan dan sekolah atau yayasan. Upaya yang dilakukan oleh

Kepala SMPN 3 Negeri Besar, para guru, komite sekolah dan orang tua murid merupakan praktik yang tepat untuk penerapan MBS dan harus menjadi model bagi sekolah lain. Tiga kampanye inspiratif yang dilaksanakan oleh Tri Haryono selaku Kepala SMPN 3 Negeri Besar adalah sebagai berikut:

a. Manajemen sekolah terbuka

Manajemen terbuka bagi Tri Haryono merupakan langkah dini yang wajib dicoba sekolah apabila ingin mengaitkan warga dalam meningkatkan sekolah. Salah satu metode dalam pelaksanaan manajemen terbuka ialah dengan melaksanakan pendekatan dengan komite serta orang tua siswa. Misalnya kala menyusun program sekolah, ia mengaitkan komite sekolah serta orangtua. Sepanjang rapat, mereka bersama-sama menyusun program serta ditaksir dana-dana yang diperlukan serta sumber dananya. Seluruhnya dilakukan secara terbuka. Salah satu tantangan dalam membangkitkan kedudukan dan warga merupakan penafsiran warga yang salah tentang program pembelajaran free. Karena masih terdapat anggota masyarakat yang berfikir bahwa sekolah tidak lagi membutuhkan peran dari masyarakat karena seluruhnya sudah ditanggung oleh pemerintah. Padahal sesungguhnya khusus biaya operasional sekolahnya saja yang ditanggung oleh pemerintah, bahkan masih banyak sekali hal-hal yang lain yang membutuhkan peran dan dorongan dari masyarakat, terkhusus yang berkaitan secara langsung pada kebutuhan peserta didik itu sendiri dan lingkungan sekolah. Contohnya seperti pada permasalahan masalah lingkungan, sekolah mempunyai tanah yang luas, lebih dari dua hektar. Perihal yang semacam itu tidak ditanggulangi oleh dana BOS dalam pemberdayaan tanah yang luas tersebut. Padahal hal itu dapat membuat peningkatan sumber belajar pada peserta didik. Dengan demikian kepala sekolah SMPN 3 Negeri Besar ini memutuskan untuk membuat program satu warga sekolah satu pohon.

b. Jumpa Kopi sebagai tingkatkan minat baca

SMPN 3 Negeri Besar juga membentuk program kegiatan berupa "Jumpa Kopi" yaitu Jumat Pagi Koleksi Pindah. Program ini ialah salah satu cara yang membuat ruang baca koleksi buku di SMPN 3 Negeri Besar selalu menjadi baru. Program ini dilakukan pada hari Jumat pagi sesudah peserta didik melaksanakan olahraga senam pagi. Program ini juga dapat meningkatkan minat baca siswa dalam rangka meningkatkan kualitas mutu pembelajaran (Sholeh 2021). Dengan di koordinasikan oleh pengurus dari masing-masing kelas, para peserta didik pada tiap kelasnya saling bertukar buku bacaan dengan kelas yang lainnya. Contohnya seperti pada kelas VIIA bertukar koleksi buku dengan kelas VIIB, dan kelas VIIC bertukar buku dengan kelas VIIIA, lalu kelas IXA bertukar buku dengan kelas IXB dan seterusnya.

c. Terapkan SIMAK

Program SIMAK (Sinergi Interaksi Memantau Aktif Pembelajaran di Kelas) dianggap sebagai salah satu jalan alternatif dari supervisi pembelajaran yang dianggap masih terlihat sangat kaku. Tri Haryono hendak membuat supervisi pembelajaran ini lebih bersifat harmonis. Artinya terdapat keseimbangan antara pemimpin dengan para stakeholdernya. Sebab supervisi sendiri bertujuan sebagai pembinaan. Tri Haryono mengungkapkan bahwa masih terdapat jarak antara dirinya dengan para stakeholdernya, oleh sebab itu program ini sangat diperlukan untuk dilaksanakan. Salah satunya dengan mengadakan supervisi dengan cara team teaching atau mengajar bersama. Dan juga kepala sekolah, pelaksanaan disiplin dan supervisi sangat berpengaruh signifikan terhadap etos kerja guru (Suyitno 2021). Walaupun menurutnya penerapan ini sedikit rumit jika dibandingkan dengan supervisi konvensional, namun kegiatan ini akan tetap dijalankan demi memperbaiki kemajuan bersama. Ada beberapa permasalahan yang muncul sehingga sangat diperlukan untuk melaksanakan perubahan dengan menerapkan SIMAK.

Permasalahan tersebut antara lain yaitu: seperti pada pembuatan RPP, terdapat masih sering sekali ditemukan RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran) yang dibuat oleh para guru tidak sesuai dengan

pelaksanaannya. Kemudian terdapat pula beberapa guru yang hanya mengajar di kelas saja. Sehingga, siswa tidak diajak langsung belajar di kehidupan nyata. Misalnya pada pembelajaran IPA tentang menanam tumbuh-tumbuhan, siswa cenderung belajar di kelas saja dan tanpa ada praktik kelapangan untuk menanam tumbuh-tumbuhan.

Melihat beberapa permasalahan diatas, maka kepala sekolah SMPN 3 Negeri Besar mulai meminta para guru untuk langsung mengkoneksikannya dengan kehidupan nyata. Seperti: melakukan perubahan RPP secara bersama-sama. lalu, melakukan praktik secara langsung yaitu anak-anak pergi ke kebun sekolah, langsung mengidentifikasi tumbuhan, mengelompokkan berbagai macam tumbuhan.

Dengan demikian, inisiatif yang dilakukan oleh kepala sekolah SMPN 3 Negeri Besar ini kini sudah bisa dilihat hasilnya. Para guru semakin termotivasi untuk menerapkan pembelajaran aktif. Bahkan hasil sudah banyak hasil karya siswa terpasang di semua kelas. Akan tetapi, hal ini juga berdampak pada kepercayaan masyarakat. Sebab, perubahan yang terjadi di sekolah ternyata membuat orangtua siswa yang bergabung dalam paguyuban kelas bersemangat membantu program-program sekolah. Orang tua dilibatkan sekolah mulai dari menyusun perencanaan, pelaksanaan, sampai melakukan evaluasi program sekolah. Mereka yang sebelumnya tidak pernah terlibat dalam program sekolah, kini sudah terlibat aktif. Mulai dari pembuatan pojok baca kelas, taman membaca, sampai menanam pohon untuk menata keasrian sekolah. Termasuk dalam membantu menyediakan kebutuhan pembelajaran aktif untuk anak-anaknya di kelas. Hal ini sesuai dengan penelitian Lurah dan Haryanto (2014) yang menyatakan bahwa Kepala sekolah harus menerapkan prinsip-prinsip utama MBS, yakni otonomi sekolah dan partisipasi warga sekolah dalam pengambilan dan pelaksanaan keputusan.

Berdasarkan hal itu, kepala sekolah harus lebih inovatif dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi, sehingga seluruh stakeholder mampu memahami dan mengimplementasikan. Hal ini sangat penting karena keberhasilan dalam sosialisasi akan menentukan keberhasilan langkah-langkah implementasi MBS selanjutnya. Sosialisasi implementasi MBS harus dilakukan secara tegas dan jelas tidak hanya kepada warga sekolah, tetapi juga secara vertikal kepada pemerintah yang terkait sehingga semua pihak akan memberi perhatian dan dukungan yang lebih besar. Selanjutnya kepala sekolah dan komite sekolah harus membuat kebijakan-kebijakan baru yang dapat meningkatkan peran serta masyarakat atau wali murid dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah.

## **KESIMPULAN**

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan konsep pengelolaan sekolah yang ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di era desentralisasi pendidikan. Pelaksanaan MBS adalah sebuah proses formal yang melibatkan kepala sekolah, guru, orang tua, peserta didik dan masyarakat yang berada dekat dengan sekolah dalam proses pengambilan keputusan. Keberhasilan penerapan MBS tersebut sangat tergantung pada kemampuan kepala sekolah untuk dapat berperan secara aktif dalam pengelolaan sekolah dengan memberdayakan semua komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan sekolah, khususnya dalam memberdayakan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian di SMPN 3 Negeri Besar, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan sudah melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah, hal ini dibuktikan dengan tiga gerakan inspiratif yang dibangun oleh kepala sekolah beserta staf komite, antara lain (1) Program manajemen sekolah terbuka dengan melakukan pendekatan dengan komite dan orang tua siswa, (2) Program jumpa kopi sebagai tingkatkan minat baca, dan (3) program SIMAK atau Sinergi Interaksi Memantau Aktif Pembelajaran di Kelas. Dengan diterapkannya program MBS tersebut, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.



## DAFTAR PUSTAKA

- Bahtiar Yoyon Irianto. 2011. *Kebijakan Pembaruan Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Duhou Abu Ibtisam. 2012. *School-Based Management*. Jakarta: Logos.
- Fitrah, Muh. 2017. “Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan.” *Jurnal Penjaminan Mutu* 3 (1): 31–42.
- Hadi Miarso Yusuf. 2014. *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Haranti, Meutia Rahmi, dan Hudaidah Hudaidah. 2021. “Perkembangan Pendidikan Madrasah pada Masa Orde Baru.” *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3 (3): 672–79.
- Ibrahim Bafadal. 2013. *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ikhsan, Sukardi, dan Indah Anisykurlillah. 2010. “Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah Smk Negeri Dan Smk Swasta Se-Karasidenan Semarang.” *Dinamika Pendidikan* 5 (1).
- Karna Husni. 2015. *Manajemen Perubahan Sekolah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Lurah, Indra Haryanto Sindang, dan Haryanto Haryanto. 2014. “Peran Kepala Sekolah Dalam Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (Mbs) Di SDIT Jabal Nur Gamping, Sleman.” *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* 2 (2): 174–87.
- Mistrianingsih, Siti, Ali Imron, dan Ahmad Nurabadi. 2015. “Peran kepala sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah.” *Jurnal Manajemen Pendidikan* 24 (5): 367–75.
- Muhammad, Sahril, dan Mardia Rahman. 2017. “Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Sekolah Dasar Islam Insan Kamil Bacan Kabupaten Halmahera Selatan.” *Edukasi* 15 (1).
- Nur Aedi. 2010. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah; Buku 1 Konsep Dasar*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional.
- Prastowo A. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif: dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rohiat. 2008. *Manajemen Sekolah*. Bandung: Refika Aditama.
- Rosyada Dede. 2012. *Paradigma Pendidikan Demokratis*. Jakarta: Kencana.
- Sholeh, Ahmad. 2021. “Kontribusi Profesionalisme Guru Kelas Dan Minat Baca Siswa Dalam Meningkatkan Prestasi Hasil Pembelajaran Tematik Integratif.” *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3 (3): 781–90.
- Siahaan Amiruddin dkk. 2006. *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah*. Jakarta: Quantum teaching.
- Slamet, PH. 2016. *Manajemen Berbasis Sekolah: Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas, dan Income Generating Activity*. Jakarta: Buletin Pelangi Pendidikan.
- Sudarmawan Danim. 2012. *Konsep dan Teori Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Suyitno, Suyitno. 2021. “Analisis Kepemimpinan Kepala Sekolah, Penerapan Disiplin, Dan Pengawasan Terhadap Etos Kerja.” *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3 (3): 728–38.
- Umiarso dan Imam Gojali. 2010. *Manajemen Mutu Sekolah di Era Otonomi Pendidikan*. Yogyakarta: IRCiSod.
- Zakaria, Darmawati, dan Sulaiman Ibrahim. 2018. “Efektivitas Bimbingan Belajar Mandiri Dan Implikasinya Terhadap Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Peserta Didik Di Smk Negeri 3 Gorontalo.” *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner* 3 (2): 1–18.